

TRIWULAN I 2026



LAPORAN KINERJA PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan menyajikan perkembangan kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja dan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 secara konkret dalam mencapai sasaran serta indikator kinerja kegiatan.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada triwulan berikutnya guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 April 2026

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Daftar Tabel	1
Daftar Gambar	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tujuan.....	7
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	7
D. Keragaan Pegawai	11
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026	17
F. Potensi dan Permasalahan.....	18
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Rencana Kerja Tahun 2026.....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	27
D. Pengukuran Kinerja	28
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	32
C. Akuntabilitas Keuangan.....	53
D. Efisiensi Sumber Daya	58
BAB IV	59
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Permasalahan dan Tindakanlanjutan.....	60
LAMPIRAN	61

Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Kinerja Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026	4
Tabel 2 Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026	12
Tabel 3 Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 4 Rencana Kerja Pusluh KP TA 2026	26
Tabel 5 Pagu Anggaran Unit Kerja lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026.....	27
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2026.....	28
Tabel 7 Bobot validitas IKK.....	29
Tabel 8 Klasifikasi target indikator kinerja.....	30
Tabel 9 Capaian IKK Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026	32
Tabel 10 Capaian IKK-1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan.....	34
Tabel 11 Rincian capaian Persentase Kelompok Pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya	35
Tabel 12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	44
Tabel 13 Nilai Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Lingkup BPPSDM Triwulan I Tahun 2026.....	44
Tabel 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	51
Tabel 15 Perbandingan IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya.....	51
Tabel 16 Realisasi Anggaran lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026	53
Tabel 17 Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran IKK Pusat Penyuluhan Triwulan I Tahun 2026	54
Tabel 18 Rancangan Indikator dan Target Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	65

Daftar Gambar

Gambar 1 Nilai Kinerja Organisasi Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	8
Gambar 3 Susunan tim kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	10
Gambar 4 Distribusi Status Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.....	12
Gambar 5 Persentase Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan jenis kelamin	13
Gambar 6 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP.....	13
Gambar 7 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional	14
Gambar 8 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP berdasarkan tingkat pendidikan.....	14
Gambar 9 Keragaan Penyuluh Perikanan lingkup Pusluh KP per provinsi	15
Gambar 10 Sebaran Penyuluh Perikanan Lingkup UPT/Satminkal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026.....	16
Gambar 11 Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru (<i>Blue Economy</i>)	23
Gambar 12 Sasaran Program BPPSDM KP.....	25
Gambar 13 Sasaran Kegiatan Pusluh KP.....	25
gambar 14 Anggaran Unit Kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 15 Predikat Nilai Kinerja Organisasi	29
Gambar 16 Nilai NKO Pusluh KP pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026	31
Gambar 17 Empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP.....	47
Gambar 18 Perbandingan Capaian IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	52
Gambar 19 Persentase Realisasi anggaran Lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026	53
Gambar 20 Lampiran Perjanjian Kinerja Pusluh Kelautan dan Perikanan 2026 awal (5 Januari 2026)	63
Gambar 21 Lampiran Surat Tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.....	64

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan unit Eselon 2 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusluh KP didukung oleh empat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, dan empat UPT Pelatihan dan Penyuluhan yang juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Pusluh KP mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tanggal 5 Januari 2026 dengan 2 Sasaran Kinerja dan 14 Indikator Kinerja, Pusluh KP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,79%.



Gambar 1 Nilai Kinerja Organisasi Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

Dari 14 Indikator Kinerja Pusluh KP Tahun 2026, terdapat tiga indikator yang diukur dengan periode triwulan, dua indikator yang diukur pada periode semesteran dan sembilan indikator yang diukur dengan periode tahunan. Pada Triwulan I Tahun 2026, Indikator Kinerja yang telah tercapai di Pusluh KP adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%	
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	%	13	3,50		3,83	104,43
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	%	86	86		100	116,28
3		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	%	77	77		100	120

Realisasi anggaran Pusluh KP sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 mencapai Rp. 177.053.815.907,- atau 25,98% dari anggaran yang dialokasikan senilai Rp681.528.764.000,-.

Identifikasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 mengungkapkan kendala utama berupa keterbatasan kuantitas, kompetensi penyuluh, serta sarana

pendukung di lapangan. Hambatan dalam diseminasi teknologi inovatif secara tatap muka juga terjadi akibat adanya keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menetapkan langkah strategis melalui transformasi penyuluhan dengan pendekatan *SUPER Extension*. Rencana ini mencakup akselerasi uji kompetensi bagi penyuluh perikanan guna memastikan kualitas pendampingan yang profesional dan terstandar. Selain itu, dilakukan penguatan integrasi digital, optimalisasi basis data, serta peningkatan sinergi kemitraan untuk memastikan adopsi inovasi teknologi oleh pelaku usaha berjalan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) merupakan unit kerja eselon II dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaannya, Pusluh KP menangani penguatan kelembagaan penyuluhan, peningkatan kapasitas pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan, penyediaan tenaga penyuluh yang kompeten, serta penyediaan prasarana dan sarana penyuluhan yang memadai untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai salah satu unit kerja pemerintah, Pusluh KP wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, serta reviu dan evaluasi kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam kerangka SAKIP tersebut, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi instrumen penting untuk memantau capaian program dan kegiatan, menunjukkan keterkaitan antara rencana kerja, perjanjian kinerja, dan realisasi output serta outcome, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan Kinerja Triwulan I Pusluh KP disusun sebagai bentuk implementasi komitmen kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, serta sebagai dasar untuk memantau dan menilai realisasi kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan pada triwulan pertama tahun anggaran 2026. Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memastikan konsistensi arah dan

kualitas kinerja Pusluh KP, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam penyusunan program lanjutan di triwulan–triwulan berikutnya sesuai prinsip SAKIP yang berkelanjutan.

B. Tujuan

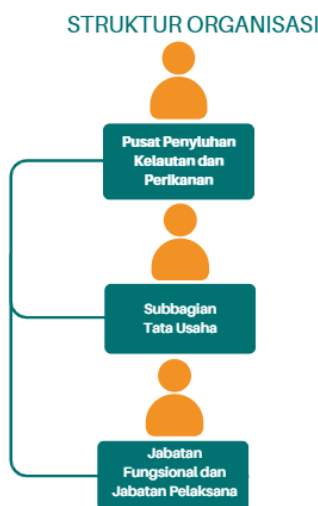
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menyajikan gambaran capaian kinerja secara terukur, transparan, dan akuntabel selama periode Januari–Maret 2026 sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana realisasi program dan kegiatan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan telah mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan 2026, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran program pada triwulan-triwulan berikutnya. Selain itu, laporan ini memenuhi kewajiban pelaporan kinerja instansi pemerintah kepada pimpinan, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran dan sumber daya negara, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
- e. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Subbagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan



Gambar 2 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusluh KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan penilaian teknologi terekomendasi untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

- e. pelaksanaan model pemberdayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan model percontohan untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan model inkubasi bisnis untuk penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pendampingan kelompok, gabungan kelompok, korporasi, dan/atau koperasi Kelautan dan Perikanan;
- j. koordinasi dan pengelolaan tenaga penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- k. koordinasi pelaksanaan kemitraan nasional dan internasional penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, dalam rangka membagi tugas dan fungsi Pusluh KP, Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menerbitkan surat tugas Nomor: B.431/BPPSDM.2/KP.440/II/2026 tanggal 6 Februari 2026. Dalam surat tugas tersebut, pegawai Pusluh KP dibagi menjadi: 1) Tim Kerja Teknis yang melaksanakan tugas terkait teknis penyuluhan (kelembagaan, pelaksanaan, percontohan dan ketenagaan penyuluhan) dan 2) Subbagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas terkait dukungan manajemen (layanan perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, keuangan, kepegawaian, BMN, umum dan kerumahtanggaan, kearsipan, data dan informasi, hubungan masyarakat). Berdasarkan pembagian tugas tersebut, Kepala Pusat membagi tanggung jawab pelaksanaan indikator kinerja kepada seluruh pegawai.



Gambar 3 Susunan tim kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Setiap Tim Kerja di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan masing-masing memiliki kontribusi pada Indikator Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. **Tim Kerja Kelembagaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggung jawab pada Indikator Kinerja *Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya*.
2. **Tim Kerja Pelaksanaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; serta Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan*.
3. **Tim Kerja Percontohan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan; serta Desa Perikanan Cerdas yang menjadi Sentra Kelautan dan Perikanan*.
4. **Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi*.
5. **Sub Bagian Tata Usaha**, memiliki tugas dan tanggungjawab pada Indikator Kinerja *Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan*

Perikanan, Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP, serta Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

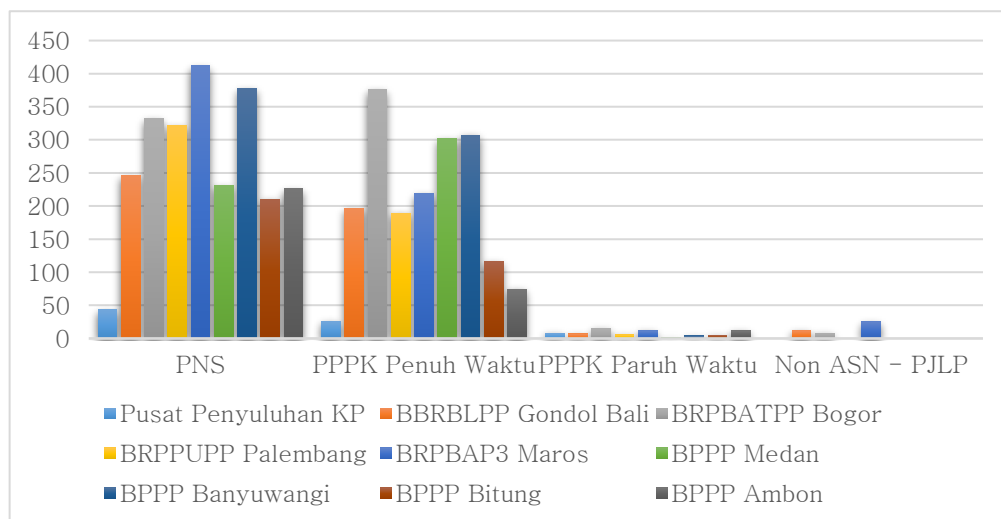
Dalam mencapai target kinerja kegiatan penyuluhan, Pusluh KP didukung oleh empat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, dan empat UPT Pelatihan dan Penyuluhan yang juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.

D. Keragaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung oleh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, pada Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 4.275 orang pegawai, dengan jumlah PNS sebanyak 2.398 orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 1.806 Orang, PPPK Paruh Waktu 71 Orang, Non PNS (PJLP) sebanyak 45 orang.

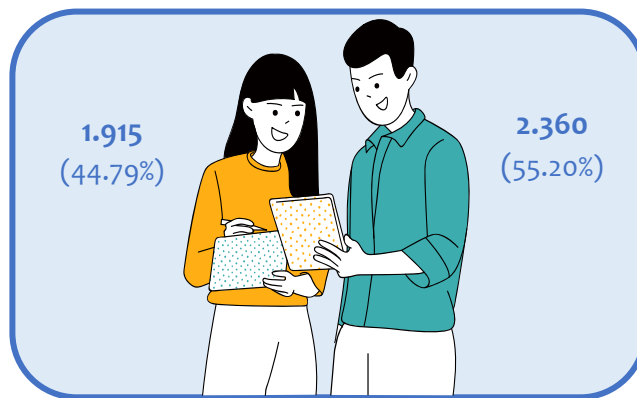
Tabel 2 Distribusi Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	PJLP	Jumlah
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	43	26	8	-	77
2	BBRBLPP Gondol Bali	246	197	7	12	450
3	BRPBATPP Bogor	332	376	15	8	723
4	BRPPUPP Palembang	321	189	6	-	516
5	BRPBAP3 Maros	412	219	12	25	643
6	BPPP Medan	231	302	2	-	535
7	BPPP Banyuwangi	377	307	4	-	688
8	BPPP Bitung	210	116	5	-	331
9	BPPP Ambon	226	74	12	-	312
Total		2.398	1.806	71	45	4.275



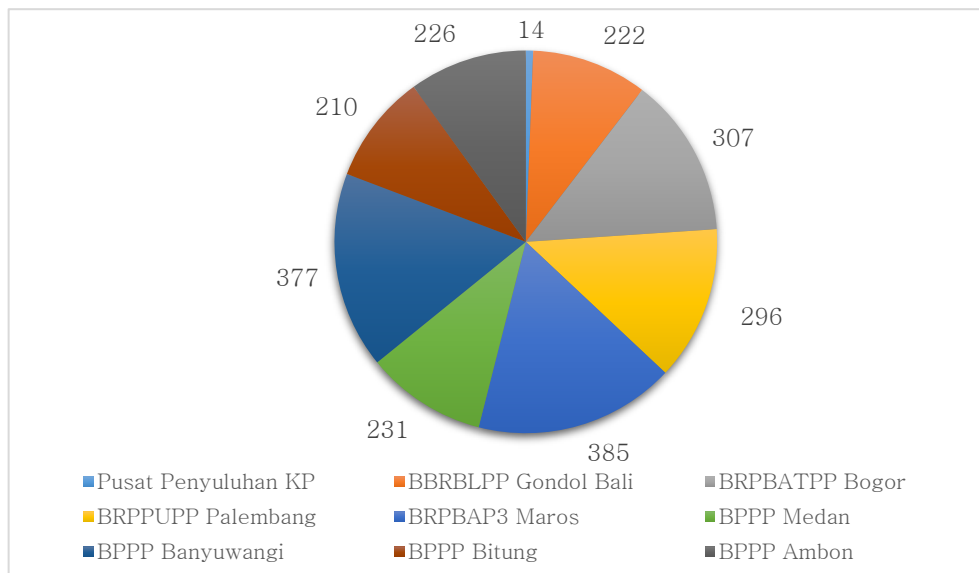
Gambar 4 Distribusi Status Pegawai Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

Dilihat dari tabel distribusi total pegawai PNS memiliki kontribusi paling besar terhadap Pusluh KP sebesar 56,09% kemudian PPPK sebesar 42,24%, PPPK Paruh Waktu Sebesar 1,66% dan Non ASN (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan/PJLP) sebesar 1,05%. Sedangkan jumlah pegawai CPNS, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu jika dilihat berdasarkan jenis kelamin bahwa pegawai di lingkup Pusluh KP secara umum, jumlah laki-laki sebesar 2.360 orang (55,20%) dan jumlah perempuan sebesar 1.915 orang (44.79%).



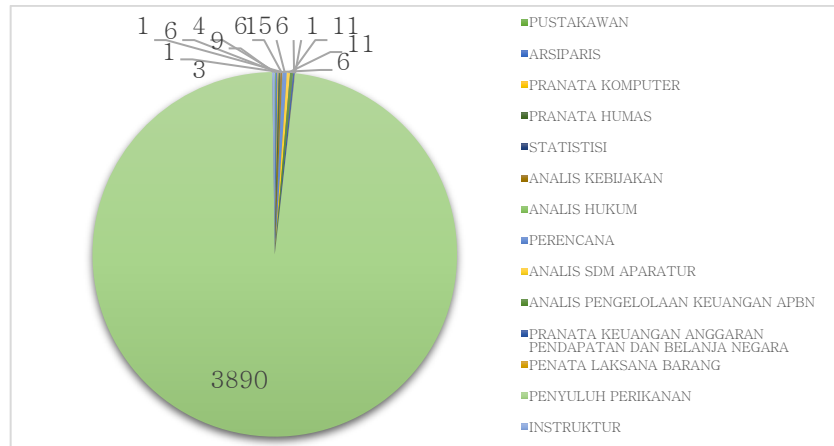
Gambar 5 Persentase Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan jenis kelamin

Dari jumlah ASN lingkup Pusluh KP sebanyak 4.275 orang, diperoleh komposisi jumlah pegawai Struktural sebanyak 8 orang atau 0,19%, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) PNS sebanyak 2.268 orang atau 53,15%, Jabatan Fungsional Umum (JFU) PNS sebanyak 122 orang atau 2,85%, JFT PPPK sebanyak 1659 orang atau 38,87%, JFU PPPK sebanyak 147 orang atau 3,44% dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 71 orang atau 1,66%.



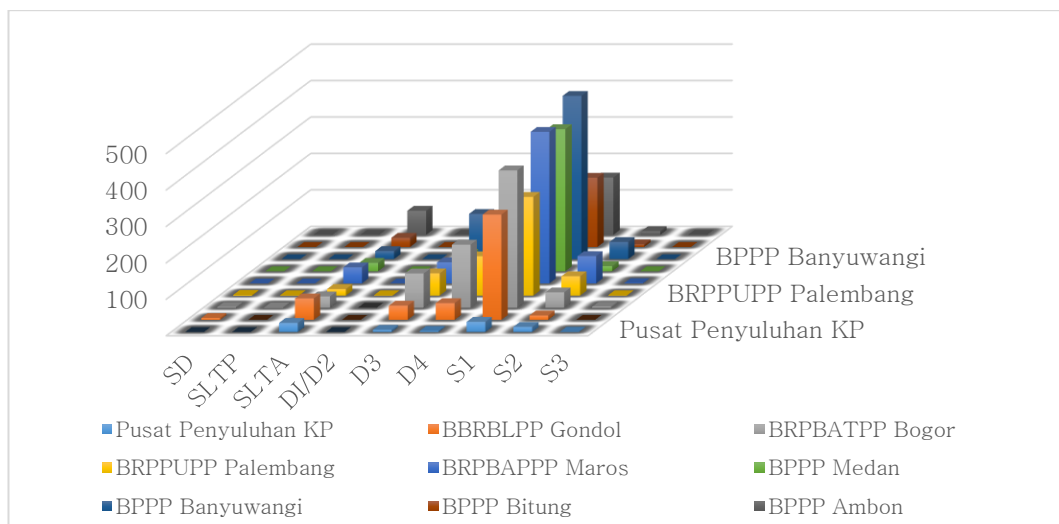
Gambar 6 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Lingkup Pusluh KP

Dari 4.275 orang pegawai Pusat Penyuluhan Perikanan sebanyak 3.970 orang pegawai Pusluh KP yang melaksanakan JFT dengan 14 kategori jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh masing-masing pegawai Pusluh KP, yaitu:



Gambar 7 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional

Berdasarkan data tingkat pendidikan pegawai per Triwulan I Tahun 2026, di lingkup Pusat Penyuluhan dan Perikanan terdapat pegawai CPNS dan PNS sebanyak 2.398 orang dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak enam orang, S2 sebanyak 252 orang, S1 sebanyak 1.319 orang, D4 sebanyak 182 orang, D3 sebanyak 363 orang, D1/D2 sebanyak 1 orang dan $\leq$ SMA sebanyak 275 orang, sisanya adalah PPPK dengan jumlah 1.877 orang (termasuk PPPK Paruh Waktu) dengan rincian pendidikan S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 1.247 orang, D4 sebanyak 344 orang, D3 sebanyak 215 orang dan $\leq$ SMA sebanyak 49 orang.



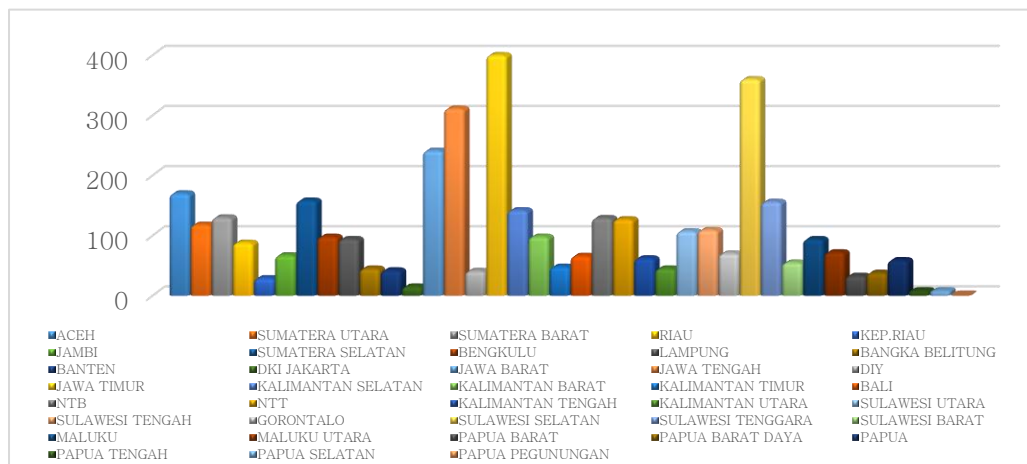
Gambar 8 Keragaan pegawai lingkup Pusluh KP berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3 Jumlah Pegawai Lingkup Pusluh KP berdasarkan Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	DI/D2	D3	D4	S1	S2	S3
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	-	-	25	-	6	3	28	14	1
BBRBLPP Gondol	5	-	59	-	39	46	289	12	-
BRPBATPP Bogor	2	1	31	-	94	173	377	42	3
BRPPUPP Palembang	2	1	18	1	61	108	271	53	1
BRPBAPPP Maros	-	-	44	-	58	49	416	75	1
BPPP Medan	-	-	23	-	48	60	390	14	-
BPPP Banyuwangi	-	-	22	-	124	47	448	47	-
BPPP Bitung	-	-	25	-	82	27	190	7	-
BPPP Ambon	-	-	66	-	66	13	157	10	-
Total	9	2	313	1	578	526	2.566	274	6

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup Pusluh KP, dilaksanakan tugas belajar bagi seluruh ASN lingkup Pusluh KP. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

Data jumlah Penyuluh Perikanan lingkup UPT/Satminkal Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026 terdapat sebanyak 3.933 orang dengan sebaran sebagai berikut berikut:



Gambar 9 Keragaan Penyuluh Perikanan lingkup Pusluh KP per provinsi



Gambar 10 Sebaran Penyuluh Perikanan Lingkup UPT/Satminkal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Laporan Kinerja ini berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini membandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Rencana Kinerja 2026 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana dan atau penetapan kinerja yang telah dilakukan akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Selan itu, disajikan juga analisis keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan selama triwulan pada tahun berjalan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dilakukan dengan mengaitkan antara capaian dengan anggaran yang tersedia. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara umum dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat mengenai tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2026;
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Pusluh Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;

5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi;
6. **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

F. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Penyuluhan berperan strategis dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha, melalui fasilitas kelompok, peningkatan kapasitas kelembagaan, diseminasi teknologi inovatif, dukungan terhadap program *Smart Fisheries Village* (SFV), serta mendorong keberlanjutan sektor Kelautan dan Perikanan. Potensi yang dimiliki oleh Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, antara lain: keberadaan 3.933 penyuluh diantaranya 2.398 PNS, 1.877 PPPK (PPPK Penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu) di 38 Provinsi.

2. Permasalahan

Minimnya informasi, minimnya literasi digital, keterbatasan tenaga penyuluh dan kompetensinya; keterbatasan sarana dan prasarana penyuluhan; rendahnya partisipasi dan kesadaran Masyarakat; kurangnya sinkronisasi antara pemerintah, media sosial, sehingga menimbulkan kendala dalam kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan misi yang disebut Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kegiatan penyuluhan perikanan dapat mendukung Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Asta Cita pada nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 8.

Pelaksanaan kinerja Pusluh KP berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDM KP periode 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Kelautan dan Perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan**

Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sedangkan visi BPPSDM KP adalah **“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.**

Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, Pusat Pusluh KP melaksanakan misi BPPSDM KP, yakni **“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovative, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”**, melaksanakan dua Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor Kelautan dan Perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM KP Tahun 2025-2029 disusun tujuan berupa "**Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing**" maka sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka Pusluh KP merumuskan tujuan yang ingin dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna oleh pelaku usaha mikro dan kecil, serta pendukung sektor Kelautan dan Perikanan;
2. Memperluas akses pasar pelaku usaha mikro dan kecil Kelautan dan Perikanan, pelau pendukung sector Kelautan dan Perikanan terhadap lembaga permodalan, pasar, serta perizinan berusaha;
3. Mendorong kepedulian pelaku usaha terhadap keberlanjutan sumberdaya dan kelestarian lingkungan pesisir;
4. Memperkuat posisi tawar pelaku usaha Kelautan dan Perikanan melalui penguatan kelembagaan.

Arah Kebijakan

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program Presiden dan mendukung arah pembangunan jangka panjang nasional. Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju,
2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang,
3. Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat,
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat,
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari seluruh tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Gambar 11 Lima Pilar Kebijakan Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan Kelautan dan Perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029. Maka arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah Perluasan kawasan konservasi perairan, Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan, Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, Pembersihan sampah plastik laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, BPPSDM melakukan transformasi dibidang penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa target visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dapat tercapai dengan baik melalui penyelenggaraan Transformasi Penyuluh. Transformasi penyuluhan merupakan bagian penting dari arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia di sektor Kelautan dan Perikanan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan relevansi penyuluhan terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Penyuluh berperan penting dalam mempercepat adopsi teknologi inovatif, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Penyuluh difungsikan sebagai fasilitator yang memastikan pelaku usaha memperoleh akses permodalan, memperkuat jejaring pasar, dan memenuhi standar produksi nasional melalui system OSS. Selain itu, penyuluhan mendukung penguatan kelembagaan koperasi desa/kelurahan (KDMP) sebagai wadah usaha kolektif masyarakat pesisir.

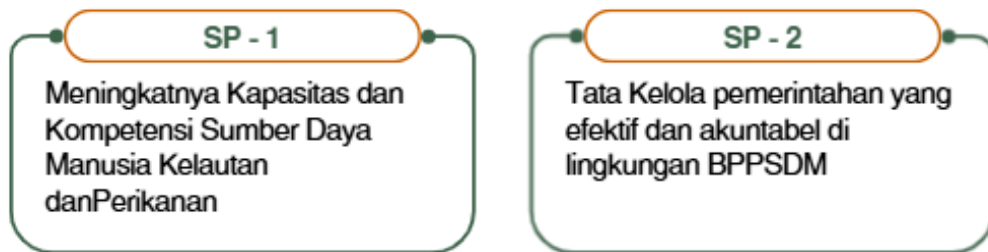
Strategi peningkatan kapasitas penyuluhan kelautan dan perikanan dengan pendekatan SUPER Extension (Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable Extension) dalam mendukung arah kebijakan dalam rangka transformasi penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Transformasi peran Penyuluh Perikanan melalui pendampingan program prioritas kelautan dan perikanan dan integrasi penyuluhan berbasis digital;
2. Penguatan sarpras percontohan, teknologi inovatif, dan media penyuluhan adaptif lokasi;
3. Fasilitasi akses pelaku usaha Kelautan dan Perikanan ke pembiayaan, pasar, koperasi, serta penataan OSS berbasis kepatuhan standar produksi;

4. Implementasi percontohan teknologi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model *Good Practices*.

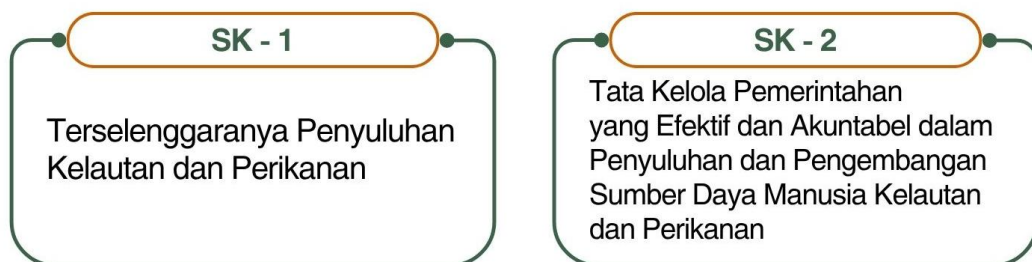
Sasaran

Sasaran Strategis (SS) Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari bidang sumber daya manusia tercantum pada **SS-4 yaitu “Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan”**. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM KP menjabarkan kedalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029, yaitu :



Gambar 12 Sasaran Program BPPSDM KP

Sedangkan Pusluh KP sendiri memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yang akan dicapai Tahun 2026 mengacu pada Sasaran Program BPPSDM KP yang diturunkan dari Sasaran Strategis KKP, yaitu:



Gambar 13 Sasaran Kegiatan Pusluh KP

B. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja Pusluh KP Tahun Anggaran 2026 menetapkan dua kegiatan, yaitu Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdapat pada seluruh unit kerja lingkup Pusluh KP.

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	22.343.260.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	659.185.504.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		681.528.764.000

Tabel 4 Rencana Kerja Pusluh KP TA 2026

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BPPSDM KP. Penetapan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 atau Perjanjian Kinerja ini memuat Sasaran Kegiatan (SK) dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terdapat pada seluruh unit kerja dilingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Kegiatan Penyuluhan (Rp)	Kegiatan Dukungan Manajemen (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	500.000.000	18.046.750.000	18.546.750.000
2	BBRBLPP Gondol	2.564.685.000	74.204.352.000	76.769.037.000
3	BRPPUPPP Palembang	2.350.365.000	84.387.897.000	86.738.262.000
4	BRPBAPPP Maros	3.228.585.000	111.221.057.000	114.509.642.000
5	BRPBATPP Bogor	3.243.965.000	108.351.083.000	111.595.048.000
6	BPPP Medan	76.131.048.000	2.471.520.000	78.602.568.000

7	BPPP Ambon	2.052.000.000	42.990.365.000	45.042.365.000
8	BPPP Banyuwangi	3.575.040.000	96.297.993.000	99.873.033.000
9	BPPP Bitung	2.297.100.000	47.554.959.000	49.852.059.000
	Total Anggaran	95.442.788.000	567.479.226.000	681.528.764.000

Tabel 5 Pagu Anggaran Unit Kerja lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada PK tersebut terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai dengan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target 14 IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80

SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Pusluh KP Tahun 2026

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pusluh KP berpedoman pada dokumen perencanaan Manual Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja secara berjenjang mulai dari level III hingga level 0. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan memasukan data capaian kinerja yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja (Aplikasi Kinerjaku) pada tautan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Selanjutnya dokumen data dukung diverifikasi untuk memastikan bahwa capaian kinerja tersebut sudah valid.

Nilai kinerja adalah akumulasi capaian indikator kinerja dan rencana aksi yang ditetapkan dalam PK, dihitung berdasarkan bobot perspektif untuk

mengukur keberhasilan organisasi secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dinyatakan dalam predikat :



Gambar 14 Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Penghitungan nilai capaian kinerja perlu memperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang didasarkan pada tingkat validitas IKK (Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi).

Tabel 7 Bobot validitas IKK

No	Validitas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Masing-masing tingkat validitas IKK memiliki bobot yang didasarkan pada karakter capaian kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Validitas Outcome yaitu manfaat atau dampak yang diharapkan oleh *stakeholder/customer* pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Selanjutnya ditentukan pola perhitungan indikator kinerja yang terdiri dari Akumulasi, Rata-rata dan Nilai Posisi Akhir. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menentukan dan menyepakati tingkat polarisasi kinerja, yang terdiri dari *Maximize*, *Minimize*, atau *Stabilize* dengan rincian sebagai berikut:

1. *Maximize*, yaitu semakin tinggi pencapaian dibandingkan target maka kinerja semakin baik, sebaliknya jika capaian semakin rendah maka kinerja semakin buruk;
2. *Minimize*, yaitu semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, sebaliknya jika capaian semakin tinggi maka kinerja semakin buruk;
3. *Stabilize*, yaitu semakin stabil atau mendekati nilai target (tidak berbeda jauh dari target) maka kinerja yang dicapai semakin baik.

Tabel 8 Klasifikasi target indikator kinerja

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	Sangat Baik

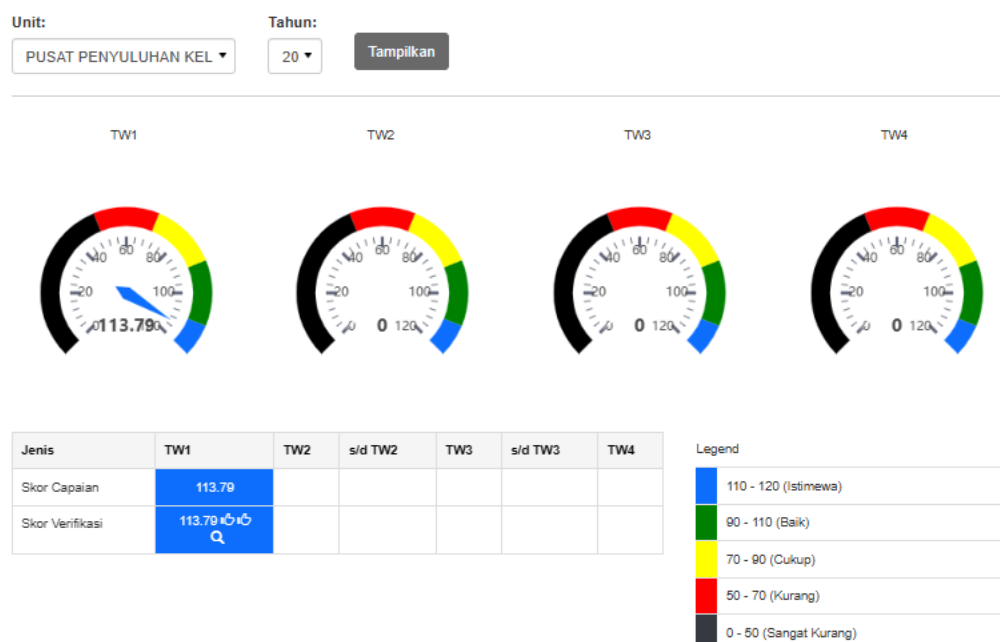
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2026 Pusluh KP melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai dua Sasaran Kegiatan (SK) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Nilai capaian SK dan IKK Tahun 2026 diperoleh dengan menggunakan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sistem aplikasi Pengelolaan Kinerja (Kinerjaku) yang dapat diakses melalui laman *kinerjaku.kkp.go.id*.

Hasil pengukuran kinerja Pusluh KP pada aplikasi Kinerjaku menunjukkan capaian Triwulan I Tahun 2026 sebesar 113,79% dengan predikat Istimewa (di atas target yang telah ditetapkan).



Gambar 15 Nilai NKO Pusluh KP pada Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi yang dilengkapi dengan informasi pencapaian antar target yang telah ditetapkan dalam PK, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian, Evaluasi atas Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan secara bertahap dan berjenjang dari level III hingga level 0.

Analisis kinerja merupakan evaluasi sistematis terhadap pencapaian tujuan, efektifitas, efisiensi, dan value kinerja terhadap IKK yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan pada PK Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian IKK Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKK yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dapat tercapai. Capaian SK dan IKK Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9 Capaian IKK Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	Target TW I 2026	REALISASI TW I 2026	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13	3,50	3,83	109,43
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	-	-	-
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	-	-	-

SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	Target TW I 2026	REALISASI TW I 2026	%
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4	-	-	-
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1	-	-	-
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	-	-	-
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86	86	100	116,28
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75	-	-	-
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	-	-	-
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81	-	-	-
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77	77	100	120 (129)

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri dari enam IKK yang mendukung sasaran tersebut dengan beberapa indikator yang ditargetkan di Tahun 2026 dengan capaian indikator kinerja diantaranya:

INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang berhasil meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir, setelah mendapatkan pendampingan oleh penyuluh perikanan. Peningkatan kelas kemampuan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dengan menghitung persentase jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor Kelautan dan Perikanan yang meningkat kelas kemampuannya dalam dua tahun terakhir dengan membandingkan terhadap jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh pada tahun sebelumnya.

Tabel 10 Capaian IKK-1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan

IKK-1 Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)										
Realisasi TW I					Tahun 2026			Persen Kenaikan TW I 2025-2026	Renstra BPPSDM 2025-2029	
2021*	2022*	2023*	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	Persen Capaian TW I		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
-	-	-	-	-	3,5	3,83	109,43	-	22	0,15

*Capaian 2020-2023 (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan))

Pada Triwulan I Tahun 2026, IKK-1 ditargetkan sebesar 3,5% dengan capaian kinerja sebesar 3,83% (109,43%). Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 karena IKK tersebut baru muncul pada Triwulan IV Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM KP Tahun 2025-2029 telah terealisasi sebesar 0,15% dari target 22% di tahun 2029. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan Eselon II lain maupun dengan Kementerian lain karena hanya ada di Pusluh KP.

Nilai Capaian IKK Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya pada Pusluh KP berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan kepada Kepala BPPSDM Nomor 409/BPPSDM.2/RC.610/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang Penyampaian data dukung Indikator Kinerja Utama Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Triwulan I Tahun 2026 (Tabel 11)

Tabel 11 Rincian capaian Persentase Kelompok Pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

Jumlah Kelompok yang Ditingkatkan Kelasnya		Jumlah Kelompok disuluh Tahun 2025	Persentase Kelompok yang Dingkatan kelasnya Triwulan I Tahun 2026
Tahun 2025	TW 1 Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	$\frac{(1 + 2)}{(3)} \times 100\%$
1.313	31	35.112	3,83%

Jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya selama dua tahun terakhir (2025-2026) adalah sebesar 1.344 kelompok, sedangkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh pada tahun 2025 adalah sebanyak 35.112 kelompok, sehingga diperoleh persentase kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya adalah sebesar 3,83%.

Capaian persentase peningkatan kelas terhadap 1.344 kelompok dari total 35.112 kelompok yang mendapatkan pendampingan (3,83%) merupakan indikator keberhasilan transformasi kelembagaan di bidang penyuluhan kelautan dan

perikanan. Pencapaian ini merefleksikan efektivitas tata kelola manajerial UPT Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam mengorganisir kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). UPT telah berhasil menjalankan fungsi verifikasi dan validasi secara sistematis, sehingga proses kenaikan kelas kelompok tidak sekadar menjadi sasaran kuantitatif, melainkan cerminan dari peningkatan mutu kelembagaan pelaku usaha yang terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendukung kebijakan dan alokasi sumber daya yang dikelola oleh unit kerja telah mampu memfasilitasi kebutuhan esensial pelaku usaha untuk berkembang ke level yang lebih mandiri.

Secara simultan, dari aspek Penyuluh Perikanan, persentase tersebut membuktikan keberhasilan fungsi pendampingan teknis dan manajerial. Peningkatan kelas kelompok merupakan proses kompleks yang memerlukan bimbingan intensif dalam aspek tata kelola administrasi, penguasaan teknologi produksi, serta penguatan akses pasar dan permodalan. Keberhasilan 1.344 kelompok dalam memenuhi kriteria kenaikan kelas menunjukkan bahwa penyuluh perikanan berperan aktif sebagai katalisator yang kompeten dalam mengubah pola pikir serta keterampilan pelaku usaha. Meski mencakup proporsi 3,83% dari total sasaran suluh, angka tersebut merepresentasikan kualitas pendampingan yang mendalam dan berkelanjutan, di mana penyuluh berhasil menyeimbangkan antara penyebaran informasi secara luas dengan pembinaan yang bersifat akseleratif bagi kelompok-kelompok pelaku usaha yang potensial.

IKK Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya didukung dengan anggaran sebesar Rp.143.354.965.667,-. Pada Triwulan I Tahun 2026 anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp.21.066.585.925,- (14,70%).

INDIKATOR KINERJA 2

Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)

Teknologi terekomendasi adalah teknologi tepat guna hasil dari inovasi di bidang Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan, yang telah mendapatkan rekomendasi melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebagai materi penyuluhan. Pemberian rekomendasi dilakukan melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh Tim Seleksi dan Penilaian Rekomendasi Teknologi Tepat Guna untuk materi penyuluhan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan 1 rekomendasi teknologi dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I ini belum terdapat capaian kinerja, namun dalam pelaksanaannya kegiatan tetap berjalan, adapun progres kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Identifikasi kebutuhan Teknologi Kelautan dan Perikanan, dan telah diperoleh hasil Analisis Kuisisioner Identifikasi Kebutuhan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
2. Telah dilakukan Penyusunan NSPK Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan, Sosialisasi NSPK Rekomendasi Teknologi terkait Keputusan Kepala Badan perihal Pedoman Seleksi dan Penilaian, dan telah dilakukan pendataan usulan Rekomendasi Teknologi;
3. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan teknologi Kelautan dan Perikanan Diseminasi inovasi Kelautan dan Perikanan yang telah direkomendasikan dengan Pelaksanaan Sharing Session Penyuluhan Soimar dan Taigan dan Es Krim Rumput Laut.

IKK Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluh Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi) didukung dengan anggaran sebesar Rp.21.180.000,- pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp2.210.000,- (40,43%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3

Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)

Materi Penyuluhan adalah isi atau substansi pengetahuan, informasi, keterampilan atau sikap yang disampaikan oleh Penyuluh kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mereka dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas mereka secara berkelanjutan, Adapun materi Penyuluhan terdiri dari Pengembangan sumber daya manusia; Peningkatan modal sosial budaya; Ilmu pengetahuan dan teknologi; Informasi; Ekonomi; Manajemen; Hukum; dan Pelestarian lingkungan

Metode Penyuluhan adalah cara atau teknik yang digunakan oleh Penyuluh untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, keterampilan, atau perubahan sikap dan perilaku kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung, Penyusunan Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang terstandar mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, metode Penyuluhan dikelompokkan berdasarkan tujuan penyuluhan; jumlah sasaran; media yang digunakan; dan teknik komunikasi.

IKK ini ditargetkan untuk menghasilkan enam paket Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar dengan periode pengukuran tahunan, sehingga belum terdapat capaian kinerja di triwulan I tahun 2026, meskipun demikian progres kegiatan pada IKK ini tetap dilaporkan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan materi penyuluhan tahun 2026, dan telah diperoleh hasil analisis kuesioner identifikasi kebutuhan materi penyuluh tahun 2026;

2. Telah dilakukan pengumpulan dan seleksi bahan dan materi penyuluhan yang dibutuhkan dan distandarisasi;
3. Telah disusun materi penyuluhan Kelautan dan Perikanan tentang Teknologi Kelautan dan Perikanan Terekomendasi dengan judul Vanamerator Hebat Tradisional dan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau Menggunakan Crab Drum;
4. Diseminasi materi pada KMS materi penyuluhan Kelautan dan Perikanan serta pelaksanaan video conference pelaksanaan penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

IKK Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Model) didukung dengan anggaran sebesar Rp.132.414.242.000,- pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.34.391.109.214,- (25,97%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah kegiatan percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik untuk menghasilkan teknologi adaptif lokasi yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.

Percontohan penyuluhan Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan untuk menghasilkan empat model percontohan penyuluhan yang diterapkan dengan periode pengukuran tahunan, sehingga

belum terdapat capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2026. Adapun progres kegiatan yang mendukung IKK ini diantaranya:

1. Telah disusunnya Perka BPPSDM No.9 Tahun 2026 tentang Unit Percontohan Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
2. Unit Pelayanan Teknis Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang baru menyampaikan usulan Lokasi UPPKelautan dan Perikanan yaitu :
 - 1) BRPBAPPP mengusulkan 4 Lokasi diantaranya Kecamatan Turikale kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan Instalasi Pembenihan Udang yang berjarak sekitar 90 km dari BRPBAPPP Maros ke arah utara.
 - 2) BRPPUPP mengusulkan 1 lokasi yaitu Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (kantor penyuluhan Keramasan BRPPUPP).

IKK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model) didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.109.622.667,- pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.5.661.000,- (0,51%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5

Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)

Desa Perikanan Cerdas merupakan konsep pembangunan dan pengembangan desa perikanan yang berbasis manajemen tepat guna, berkelanjutan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Pengembangan Desa Perikanan Cerdas mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas/*Smart Fisheries Village (SFV)* yang berlaku. Lokasi Desa Perikanan Cerdas ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDM Kelautan dan Perikanan pada tahun berjalan, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/ *Smart Fisheries Village SFV* akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu

menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

IKK ini ditargetkan sebesar 1 lembaga dengan periode pengukuran tahunan, sehingga di triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Namun demikian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK tersebut tetap dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Penentuan Rona Awal dengan survei pengukuran dimensi SFI Desa Gempokerep dan masih menunggu Analisa matriks dengan system skoring atau penilaian indikator SMART;
2. kegiatan yang masih berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang dan telah dilakukan siklus pertama budidaya nilai masih menggunakan system bioflok dari penyedia yang disusun oleh pihak WWF.

IKK Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga) didukung dengan anggaran sebesar Rp.766.163.667,- pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.7.269.281,- (0.95%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6

Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan untuk tercapai 70% dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan yang mendukung IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pengusulan 259 pegawai yang akan melaksanakan uji kompetensi penyuluh dimana jumlah pegawai yang diusulkan diperoleh dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 3 orang, BBRBLPP 30 orang, BRPBAPPP 47 orang, BRPBATPP 30 orang, BRPPUPP 42 orang, BPPP Medan

12 orang, BPPP Banyuwangi 60 orang, BPPP Bitung 16 orang, BPPP Ambon 25 orang.

2. Telah dilakukanya verifikasi serta validasi usulan peserta uji kompetensi penyuluh yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKK Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%) didukung dengan anggaran sebesar Rp.10.961.679.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.2.641.504.403,- (24.10%).

SASARAN KEGIATAN 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari delapan indikator kinerja, yaitu:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7

Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan, pemutakhiran, dan validasi data penyuluhan pada aplikasi KUSUKA dan/atau aplikasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dalam sistem basis data terpadu (One Data). Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan adalah media yang digunakan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk menyimpan dan menyampaikan

informasi data kepada stakeholder. Kegiatan Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

IKK ini ditargetkan tercapai sebesar 80% dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja, namun dalam kegiatan yang mendukung tercapaian IKK tersebut tetap dilaksanakan. Progres kegiatan tersebut diantaranya adalah melakukan pengumpulan data Penyuluh Kelautan dan Perikanan dan menyusun laporan bank data Penyuluh Kelautan dan Perikanan.

IKK Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.680.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.3.453.500,- (44.97%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan indikator kinerja yang mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas temuan pengawasan, Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran.

Rekomendasi hasil pengawasan diperoleh dari persentase jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti berdasarkan total rekomendasi yang diperoleh. Indikator kinerja dengan tingkat validitas output kendali tinggi dengan pola perhitungan nilai posisi akhir dan polarisasi maximize. Indikator kinerja ini dilaporkan dalam periode Triwulanan, yang dilaksanakan oleh seluruh

satuan kerja lingkup Pusat Riset Perikanan sebagai sumber datanya. Indikator dapat tercapai dengan bukti dukung berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BPPSDM Kelautan dan Perikanan.

Tabel 12 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

IKK-9 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW I					Tahun 2026			Persen Kenaikan TW I 2025-2026	Renstra BPPSDM 2025-2029	
2021*	2022*	2023*	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	Persen Capaian TW I		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
94,96	100	100	100	100	86	100	116,28	-	89	112,36

*) Capaian Puslatluh KP

IKK ini ditargetkan untuk tercapai pada Tahun 2026 sebesar 86% dengan periode pengukuran triwulanan. Capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 100% dengan persentase capaian IKK sebesar 116,28%, Apabila dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 112,36% dari target 89%. Capaian IKK dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan capaian 100% maka dapat dikatakan capaian kinerja konsisten.

IKK ini diimplementasikan pada seluruh unit kerja Eselon II BPPSDM KP, sehingga capaian kinerja Pusluh KP dalam persentase rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya. Mengacu kepada Nota Dinas a.n. Kepala BPPSDM KP, Sekretaris BPPSDM KP Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM Kelautan dan Perikanan”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

Tabel 13 Nilai Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Lingkup BPPSDM Triwulan I Tahun 2026

No	Satker Pusat	Temuan Awal	Temuan yang ditindak-lanjuti	Persentase Capaian
1	Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1	1	100
2	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	-	-	-
3	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15	15	100
4	Pusat Standarisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-	-	-
5	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	-	-	-
6	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	-	-	-

Dari tabel diatas, capaian tindak lanjut temuan pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menunjukkan performa yang memuaskan dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkup Satker Pusat. Secara komparatif, Pusluh KP memiliki beban tanggung jawab penyelesaian temuan yang paling signifikan, yakni sebanyak 15 temuan awal, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang hanya memiliki satu temuan, maupun unit kerja lainnya yang tidak mencatatkan adanya temuan. Meskipun menghadapi volume temuan yang jauh lebih besar, Pusluh KP mampu menunjukkan konsistensi kinerja yang luar biasa dengan menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan persentase capaian yang mencapai 100%, setara dengan unit kerja yang memiliki beban temuan lebih sedikit.

Keberhasilan Pusluh KP dalam menindaklanjuti seluruh temuan tersebut mencerminkan adanya komitmen manajerial yang kuat terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntasnya 15 temuan tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern di Pusluh KP berjalan secara efektif dan responsif dalam menanggapi setiap rekomendasi perbaikan. Selain itu, capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan administratif yang tinggi serta kemampuan koordinasi yang solid antara pimpinan dan staf dalam memitigasi risiko organisasi. Dengan demikian, Pusluh KP berhasil memposisikan diri sebagai unit kerja yang handal dalam menjaga integritas

pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sekaligus responsitas terhadap audit dan evaluasi.

IKK Persentase Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.890.879.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.959.843.895,- (24.67%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

IKK ini ditargetkan untuk tercapai sebesar 92,1 dengan periode pengukuran semesteran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini yaitu telah dilakukan penyesuaian halaman III DIPA, penyelesaian tagihan Uang Persediaan tepat waktu, rekonsiliasi eksternal antara Pusluh KP dengan KPPN, serta penginputan capaian output dan monitoring IKPA pada periode Triwulan I Tahun 2026.

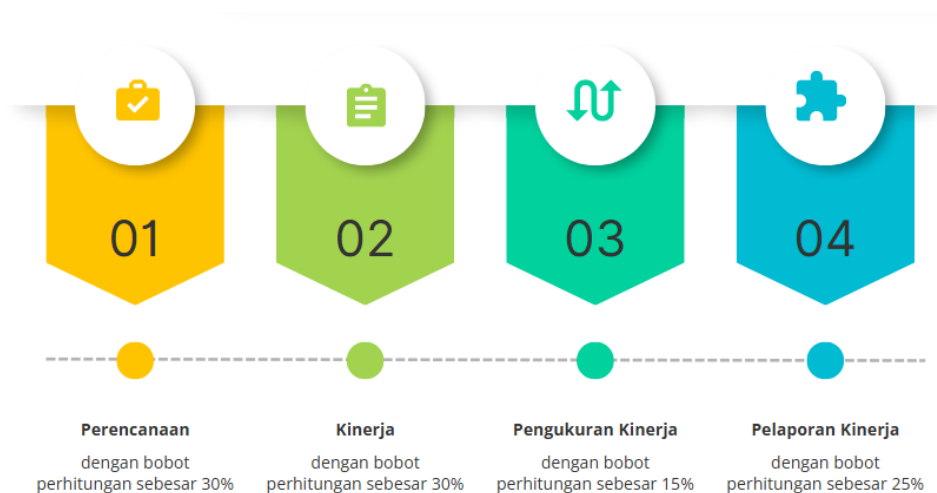
IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung dengan anggaran sebesar Rp.375.563.747,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp92.210.324.961,- (24,55%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10

Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP BPPSDM KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, nilai PM SAKIP BPPSDMKelautan dan Perikanan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDMKelautan dan Perikanan di lingkungan KKP. PM SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDM KP, dan data capaian diperoleh melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Terdapat empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, sebagai berikut:



Gambar 16 Empat aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP

Pada Tahun 2026 IKK ini ditargetkan untuk tercapai sebesar 82 dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan pada IKK ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyusunan dan pendokumentasian dokumen kinerja Manual IKU Level II, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Matriks Cascading Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan;
2. Telah tersedianya capaian kinerja level 2 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tepat waktu;
3. Telah dilakukan pengumpulan dokumen Penilaian Mandiri SAKIP secara berkala pada komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

IKK Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp.26.114.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.4.108.000,- (15,71%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 11

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan untuk tercapai sebesar 71,75 dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan pada IKK ini adalah penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK) di Rincian Output yang ada pada DIPA Pusluh KP Tahun 2026.

IKK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.281.779.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.1.027.762.260,- (16,36%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 12

Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang

menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Kelautan dan Perikanan yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan untuk tercapai sebesar 82 dengan periode pengukuran semesteran, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerja. Progres kegiatan pada IKK ini yaitu keikutsertaan pegawai Pusluh KP dalam pelatihan teknis dan webinar yang mendukung pengembangan kompetensi di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan.

IKK Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks) didukung dengan anggaran sebesar Rp29.166.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp4.597.300,- (15,76%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 13

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan Kelautan dan Perikanan adalah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

IKK ini pada Tahun 2026 ditargetkan tercapai dengan nilai sebesar 81 dengan periode pengukuran tahunan, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat capaian kinerjanya. Progres kegiatan pada IKK ini diantaranya adalah keikutsertaan Pusluh KP pada sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp.18.671.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.810.000,- (4,34%).

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 14

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKelautan dan Perikanan. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan

Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Tabel 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK-14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)										
Realisasi TW I					Tahun 2026			Persen Kenaikan TW I 2025-2026	Renstra BPPSDM 2025-2029	
2021*	2022*	2023*	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I	Persen Capaian TW I		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
-	-	-	-	100	77	100	120 (129,87)	-	89	112,36

*Capaian Puslatluh Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2023

IKK ini pada Triwulan I Tahun 2026 ditargetkan sebesar 77% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan persentasi capaian IKK sebesar 129,87% namun terdapat batas maksimal persentase nilai capaian yaitu sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku. Capaian IKK ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025 dikarenakan IKK baru tersedia pada Triwulan IV Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 112,36% dari target 89%.

Nilai capaian IKK Pusluh KP mengacu pada Nota Dinas Sekretaris BPPSDM KP Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 yanggal 13 April 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026. Karena IKK ini merupakan indicator kinerja yang diterapkan di seluruh unit kerja Eselon II maka capaian kinerja Pusluh KP Persentase rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2026 dapat dibandingkan dengan unit kerja Eselon II lainnya.

Tabel 15 Perbandingan IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dengan Eselon II Lainnya

Satker	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	77	100	129%
Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	77	100	129%

Gambar 17 Perbandingan Capaian IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja Pusluh KP menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat efektivitas yang melampaui target yang telah ditetapkan. Secara komparatif, Pusluh KP memiliki tingkat keberhasilan yang setara dan konsisten dengan Pusat Standarisasi dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan, di mana keduanya berhasil merealisasikan angka 100 dari target sebesar 77. Hal ini menghasilkan persentase capaian sebesar 129%. Kesetaraan angka ini mengindikasikan adanya standar kualitas kerja yang seragam dan optimal di tingkat Satker Pusat dalam mencapai target strategis organisasi, meskipun keduanya bergerak pada substansi yang berbeda.

Keberhasilan Pusluh KP dalam mencapai persentase capaian 129% mencerminkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pemanfaatan sumber daya serta ketepatan strategi eksekusi program di lapangan. Keberhasilan melampaui target hingga 29% tersebut menunjukkan bahwa unit kerja tidak hanya terpaku pada pemenuhan target minimal, tetapi mampu melakukan akselerasi kinerja melalui inovasi pendampingan dan optimalisasi peran penyuluh perikanan. Capaian ini juga mengindikasikan adanya perencanaan yang matang serta responsivitas yang baik terhadap kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, sehingga output yang dihasilkan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari yang diproyeksikan semula. Secara manajerial, hal ini mempertegas kredibilitas Pusat Penyuluhan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama kementerian secara akuntabel dan berorientasi pada hasil.

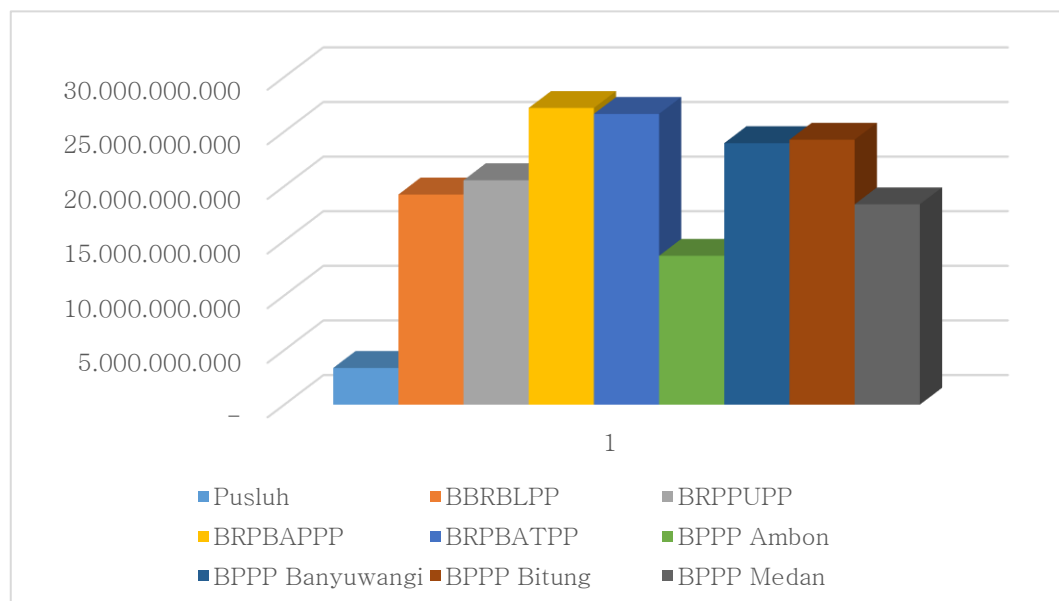
IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai) didukung dengan anggaran sebesar Rp.7.082.845.000,- dan pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp.1.315.224.846,- (18,57%).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan I Tahun 2026 kegiatan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan seluruh UPT lingkupnya dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dengan realisasi sebesar Rp.177.053.815.907 (25,98%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp681.528.764.000,- dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Anggaran lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase
1	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	18.546.750.000	3.354.889.960	18,09%
2	BBRBLPP Gondol	76.769.037.000	19.235.700.585	25,06%
3	BRPPUPPP Palembang	86.738.262.000	20.545.096.412	23,69%
4	BRPBAPPP Maros	114.509.642.000	27.156.363.984	23,72%
5	BRPBATPP Bogor	111.595.048.000	26.612.603.778	23,58%
6	BPPP Medan	78.602.568.000	13.623.423.636	30,25%
7	BPPP Ambon	45.042.365.000	23.938.964.451	23,97%
8	BPPP Banyuwangi	99.873.033.000	24.249.437.629	48,64%
9	BPPP Bitung	49.852.059.000	18.337.342.472	23,33%
	Total	681.528.764.000	177.053.815.907	25,98%



Gambar 18 Persentase Realisasi anggaran Lingkup Pusluh KP Triwulan I Tahun 2026

Tabel 17 Rincian Capaian Kinerja dan Anggaran IKK Pusat Penyuluhan Triwulan I Tahun 2026

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN I 2026	CAPAIAN TRIWULAN I 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13	3,5	3,83	109,43	7020.AFA.166.201.DB NSPK Kelembagaan Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas	143.354.965.667	21.066.585.925	14,70
2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	0			7020.ABW.129.200.D A Teknologi Terekomendasi Penyuluhan KP	21.180.000	2.210.000	10,43
3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	0			7020.AFA.166.201.DA NSPK Pelaksanaan Penyuluhan KP	132.414.242.000	34.391.109.217	25,97
4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4	0			7020.AFA.166.201.DD NSPK Percontohan Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas	1.109.622.667	5.661.000	0,51
5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1	0			7020.QDB.646.201.D A Penerapan percontohan SMART FISHERIES VILLAGE (SFV) Penyuluhan KP 2376.FAN.ZZ1.ZZ1.KC Pendampingan	766.163.667	7.269.281	0,95

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2026

	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
						Masyarakat KP dalam mendukung Program Prioritas			
6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70	0			7020.DCC.436.201.DA Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompeten 7020.AFA.166.201.DC NSPK Ketenagaan Penyuluhan KP	10.961.679.000	2.641.504.403	24,10
7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	0			2378.EBA.963.101.DA Layanan Data dan Informasi Penyuluhan KP	7.680.000	3.453.500	44,97
8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86	86	100	116,28	2378.EBA.962.201.DB Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan	3.890.879.000	959.834.895	24,67
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	91,1	0			2378.EBA.994 Layanan Perkantoran 7020.RBQ.726.10.DA Gedung dan Bangunan Penunjang Penyuluhan KP 2378.EBA.962 Layanan Umum 2378.EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan	375.563.747.000	92.210.324.961	24,55

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
					Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) 2378.EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)			
10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	0		2378.EBA.962.201.DD Penyusunan Kegiatan Penyuluhan 2378.EBA.962.201.DE Penyusunan Anggaran Penyuluhan 2378.EBD.Z25.101.DB Penilaian Mandiri SAKIP Penyuluhan KP	26.144.000	4.108.000	15,71
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75	0		2378.EBD.Z25.101.DA . Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Penyuluhan KP 2378.EBD.Z25.101.DC . Penyusunan Laporan Kinerja dan Rekon Kinerja Penyuluhan KP	6.281.779.000	1.027.762.260	16,36

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2026

INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	PERSENTASE	RO PENDUKUNG	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1 2	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	0			2378.EBC.Layanan Manajemen SDM Internal	29.166.000	4.597.300	15,76
1 3	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81	0			2378.EBD.Z34.101.DA Layanan Persuratan Kearsipan Penyuluhan KP	18.671.000	810.000	4,34
1 4	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77	77	100	120 (129, 87)	2378.EBA.962.201.DC Penatausahaan Aset 2378.EBA.Z07.101.DA Pengelolaan BMN Penyuluhan KP	7.082.845.000	1.315.224.846	18,57
					113,79		681.528.764.000	153.640.455.588	22,54

D. Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2026 mencerminkan keberhasilan strategi efisiensi dan optimalisasi seluruh instrumen sumber daya organisasi. Dari aspek anggaran, unit kerja telah berhasil merealisasikan program kerja dengan prinsip *value for money*, di mana penyerapan pagu terkendali secara proporsional sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) namun mampu menghasilkan output yang melampaui target periodik. Efisiensi ini didukung oleh pemanfaatan sarana dan prasarana secara terintegrasi, termasuk optimalisasi platform digital untuk koordinasi dan pelaporan yang secara signifikan mereduksi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan penyuluhan di lapangan.

Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui peran strategis penyuluh perikanan sebagai garda terdepan, menunjukkan tingkat produktivitas yang sangat tinggi melalui pola kerja kolaboratif dan pembagian beban tugas yang terukur sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kompetensi SDM yang mumpuni memungkinkan Pusluh KP untuk memperluas jangkauan pembinaan kelompok pelaku usaha meskipun di tengah keterbatasan sarana fisik. Secara keseluruhan, integrasi yang harmonis antara anggaran yang akuntabel, dukungan sarana yang efisien, dan SDM yang responsif pada Triwulan I ini menjadi landasan kuat dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi sektor kelautan dan perikanan nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan I Tahun 2026 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menargetkan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang semuanya telah tercapai dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **113,79%** dan memperoleh predikat **Istimewa**. Rincian capaian IKK Pusluh KP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. IKK 1 – Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya, dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,50% telah tercapai sebesar 3,83% (109,43%);
2. IKK 8 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dari target yang telah ditetapkan sebesar 86% telah tercapai sebesar 100% (116,28%);
3. IKK 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 77% telah tercapai sebesar 100% (129,87%). Nilai tersebut disesuaikan menjadi 120% karena pada aplikasi Kinerjaku terdapat batas maksimal persentase capaian;

Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 telah direalisasikan sebesar Rp.177.053.815.907 (25,98%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp681.528.764.000,-.

B. Permasalahan dan Tindaklanjut

Identifikasi terhadap capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 mengungkapkan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat akselerasi kegiatan penyuluhan di masa mendatang. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kuantitas dan kompetensi tenaga penyuluh perikanan, serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan di lapangan. Selain itu, karena keterbatasan anggaran yang ada, terdapat hambatan dalam mendiseminasikan teknologi inovatif secara massif melalui sistem tatap muka. Kendala ini perlu segera diantisipasi mengingat beban kerja penyuluhan yang sangat berat.

Sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan rencana tindak lanjut yang berfokus pada transformasi penyuluhan melalui pendekatan *SUPER Extension* (*Suggestive, Useful, Performative, Effective, Reliable Extension*). Rencana ini mencakup akselerasi uji kompetensi bagi penyuluh perikanan untuk memastikan kualitas pendampingan yang lebih profesional dan terstandar. Dari sisi manajerial, akan dilakukan penguatan integrasi penyuluhan berbasis digital dan optimalisasi basis data melalui sistem *One Data* guna mengatasi kesenjangan informasi sekaligus meningkatkan literasi digital pelaku usaha. Lebih lanjut, Pusluh KP akan memperkuat sinergi kemitraan nasional serta melakukan sinkronisasi strategi komunikasi publik untuk memastikan setiap inovasi teknologi dapat diadopsi secara efektif oleh kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAI www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (%)	13
		2	Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1
		3	Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6
		4	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)	4
		5	Desa Perikanan Cerdas yang menjadi sentra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	1
		6	Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)	70
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	77

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	22.343.260.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	659.185.504.000
Total Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2026		681.528.764.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711885
LAMAR www.kkp.go.id SUREL pusat@kp.kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B.43/BPPSDM.2/KP.440/II/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas:

- Kepada : Seluruh pegawai Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- Untuk : 1. melaksanakan tugas sebagai Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
2. melaksanakan dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
3. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
4. segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan TA. 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Terimakasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan



Jakarta, 6 Februari 2026
Kepala Pusat Penyuluhan KP,

Yayan Mikmayani
NIP. 196710041999032001

Gambar 20 Lampiran Surat Tugas Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2026

Tabel 18 Rancangan Indikator dan Target Kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

RANCANGAN INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029
PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Pelaku Utama/Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Persen)	6	13	16	19	22
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh (Kelompok)	30.000	40.100	44.300	48.000	53.000
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.157	1.326	1.464	1.621	1.746
		Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk (Kelompok)	4.000	4.200	3.700	3.700	3.600
		Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan (Unit)	300	400	400	400	400
		Nilai PNBSP Satker Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rupiah Miliar)	1,3706				
		Teknologi Rekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Kebijakan)		1	5	5	5
		Inovasi Teknologi yang Diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Paket)	1				
		Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan (Paket)	6	6	6	6	6
		Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Model)		4	11	15	19
		Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Kelompok)	3				
		Desa Perikanan Cerdas yang menjadi mitra Kelautan dan Perikanan (Lembaga)		1	10	12	14
		Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (%)		70	72	74	76
		Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	24	50	300	400	500
		Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (%)	3,2				
		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	4,0				
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		Persentase Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)		80	81	82	83
		Pengelolaan Basis Data Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	1				
		Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti Lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5				
		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	85	86	87	88	89
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,25
		Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	82	82	82	82	82
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,5
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82	82	82,5	83	83,5
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Nilai)		81	82	83	84
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80	77	78	79	80
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (%)	80				